

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aglomerasi

2.1.1 Konsep dan Definisi Aglomerasi

Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas tentang masalah aglomerasi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teori-teori tersebut, perlu dipahami lebih dahulu konsep aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri yang terlokalisasi (*localized industries*). *Agglomeration economies* atau *localized industries* menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Mc Donald, 1997: 37). Konsep aglomerasi menurut Montgomery tidak jauh berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Marshall. Montgomery mendefinisikan penghematan aglomerasi sebagai penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi (Montgomery, 1988: 693).

Sementara Markusen menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa- jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja

secara individual (Kuncoro, 2002: 24). Selanjutnya dengan mengacu pada beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi dari aktifitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan.

2.1.2 Tinjauan Teori

A. Teori Neo Klasik

Sumbangan terbesar teori neo klasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi.(Kuncoro, 2002).Asumsi yang digunakan oleh teori neo-klasik adalah *constant return to scale* dan persaingan sempurna.Alfred Weber dikenal sebagai pendiri teori lokasi modern yang berkenaan dengan tempat, lokasi dan geografi dari kegiatan ekonomi.Minimisasi biaya yang dikombinasikan dengan bobot input-input yang berbeda dari perusahaan dan industri menentukan lokasi optimal bagi suatu perusahaan.

Weber secara eksplisit memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, skala efisien minimum, dan keterkaitan ke depan dan ke belakang. Konsep ini menjadi dasar berkembangnya teori perdagangan regional baru.Dalam sistem perkotaan teori neo klasik, mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripetal aglomerasi disebut sebagai ekonomi eksternal murni.(Krugman, 1998). Kekuatan sentripetal muncul dari kebutuhan untuk pulang-pergi (*commute*) ke pusat bisnis utama dalam masing-masing kota yang menyebabkan suatu gradien sewa tanah dalam masing-masing kota.

Menurut Krugman (1998), keterbatasan teori neo klasik diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya aglomerasi masih dianggap sebagai misteri (*blackbox*). Disamping itu sistem perkotaan neo klasik adalah non spasial yang hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota tetapi tidak menunjukkan lokasinya.

B. Teori Eksternalitas Dinamis

Teori-teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota (Glaeser, et.al. 1992). Teori eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan mengapa kota tumbuh.

Eksternalitas MAR menekankan pada transfer pengetahuan antar perusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR monopoli lokal merupakan hal yang lebih baik dibandingkan dengan kompetisi lokal sebab lokal monopoli menghambat aliran ide dari industri lain dan eksternalitas diinternalisasi oleh innovator. Seperti halnya MAR, Porter mengatakan bahwa dengan transfer pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan mendorong pertumbuhan. Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat adopsi inovasi.

Tidak seperti MAR dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer pengetahuan paling penting adalah berasal datang dari industri-industri inti. Variasi dan keberagaman industri yang berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan dengan spesialisasi secara geografis.

C. Teori Ekonomi Geografi Baru (*The New Economic Geography*)

Teori ekonomi geografi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi dan *increasing return* dari perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak di asumsikan tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor produksi.

Teori ekonomi geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman dan Venables dalam Martin & Ottaviano, 2001). Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya *intermediate good* pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi dan menyebarnya permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.

Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antar perusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan manfaat bagi masing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa masing-masing perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, manfaat interaksi meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi.

D. Teori Kutub Pertumbuhan(Growth Pole Teory)

Teori ini di populerkan oleh Perroux dan menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak di terapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Kerena keterkaitan industri satu samalain sangat erat, maka pembangunan industri unggulan akan mempegaruhi perkembangan inustri yang lain yang berhubungan erat dengan industri ungulan tersebut.
- Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga pembangunan industri disuatu daerah akan mempengaruhi perkembangan industri di daerah yang lainnya.
- Perekonomian merupakan gabunagn dari sitem industri yang relatif aktif(industri unggulan) dengan industri yang relative pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relative maju atau aktif akan mempengaruhi daerah yang relative pasif.

Selanjutnya perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari asperk lokasinya pembangunan ekonomi di daerah tidak merata dan cenderung terjadi proses

aglomerasi(pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada nantinya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah yang lambat perkembangannya, terjadinya aglomerasi tersebut memiliki manfaat-manfaat tertentu yaitu keunggulan secara ekonomis(usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya.(lincoln, 1999)

2.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi di tempatkan pada urutan yang pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemeratan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan seluruh masyarakat. Secara bertahap di usahakan mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara umum pembangunan ekonomi di artikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP(Gross National product) perkapita atau pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu:

- Suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus menerus.
- Adanya usaha untuk menarik dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
- Kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang terjadi dalam jangka panjang.

Pembangunan menurut Michael Todaro di definisikan sebagai berikut, “Pembangunan ekonomi digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau

menghapuskan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pembangunan ekonomi atau ekonomi sedang berkembang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan lajunya pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDB(Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDB untuk tingkat wilayah atau regional. Tingkat PDRB (Produk Domesrik Regional Bruto) ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari PDRB, maka ini mengalami perubahan terhadap pendapatan per kapita, oleh sebab itu pertambahan PDRB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena terdapat kemungkinan timbulnya keadaan tersebut maka pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus di bedakan.

Dalam pembanguan, Rodinelli(1961) menyatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah ditunjukkan untuk mengubah cara berfikir, selalu memikirkan perlunya investasi dan pembanguan. Denagn adanya pembanguan akan terjadilah peningkatan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup yang lebih baik, saling harga menghargai sesamanya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Adapun Tujuan pembanhunan menurut Gant(1961) ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembanguan bertujuan menghapuskan kemiskinan.Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua sudah dapat dijalankan, yaitu untuk menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhanya”. Dalam rangka mencpai tujuan pembanguan maka di perlukanlah sumberdaya alam, simberdaya manusia,modal dan teknologi.Pembanguana menyangkut perubahan

mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan ini menyangkut perubahan-perubahan dalam produksi dan permintaan maupun peningkatan dalam distribusi pendapatan pekerjaan. Konsekwensinya adalah perlu diciptakanya suatu perekonomian yang lebih beragam, dengan beberapa sector utama yang saling terkait, untuk mengadakan input dan memperluas pemasaran hasil. Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan produksi nasional yang cepat.
- Mencapai tingkat kestabilan harga dengan kata lain mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi di perekonomian.
- Mengatasi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja.
- Distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat namun masalah pembangunan merupakan suatu jalinan eksistensi dari masalah sosial dan ekonomi, oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan perlu pertimbangan faktor-faktor yang bersifat non-ekonomi.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta memperjatkan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengaju pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, keadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disebutkan bahwa usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus tertuju pada manusia sebagai perorangan manusia atau faktor-faktor dari luar mengatasi kehilangan kemampuan untuk melaksanakan peran sosialnya (disfungsi sosial). Yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah bagian kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pembangunan dan bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan didalam berbagai situasi seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang dan hubungan sosial. Adapaun tahap keluarga sejahtera menurut kantor menteri negara kependudukan (BKKBN) dibagi lima tahap yaitu :

1. Keluarga prasejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, dan keluarga berencana.

2. Keluarga sejahtera I

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kegiatan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

3. Keluarga sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik dan sosial psikologisnya dan pengembangan namun kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan informasi.

4. Keluarga sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah memenuhi fisik, sosial psikologisnya dan pengembangan namun belum dapat memberikan sumbangan dan peran serta aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada.

5. Keluarga sejahtera plus

Yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan serta memiliki suatu kepedulian yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekitarnya.

Bila kemakmuran masyarakat (*people prosperity*) merupakan sasaran utama pembangunan daerah, maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada pembangunan penduduk setempat. Dalam kaitan dengan hal ini, program dan kegiatan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatsn penerapan teknologi tepat guna. Disamping itu, perhatian juga akan lebih diarahkan untuk meningkatkan kegiatan produksi masyarakat setempat dalam bentuk pengembangan kegiatan pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, peikanan dan kehutanan, serta kegiatan ekonomi kerakyatan lainnya.

Bila upaya pembangunan wilayah lebih banyak diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat ini, biasanya laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan. Penyediaan lapangan kerja pada daerah bersangkutan cenderung

bertumbuh lambat dibandingkan bila sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kemakmuran wilayah. Hal ini terjadi karena, upaya pembangunan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan upaya pembangunan fisik wilayah. Akibatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja daerah cenderung menjadi lebih rendah yang selanjutnya mengakibatkan pula kinerja pembangunan daerah bersangkutan akan cenderung akan lebih lambat

Kesejahteraan masyarakat menyangkut berbagai dimensi ini, dapat di lihat melalui indikator indeks pembangunan masyarakat (IPM) yang meliputi tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan tingkat pendapatan riil perkapita masyarakat.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP (United Nation Development Program) mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan pembangunan. Tim tersebut menciptakan IPM yang menjelaskan tentang ranking dari negara-negara di dunia dan *Human Development Report* (UNDP, 1990) menjadi yang pertama dari laporan semi tahunan.

Tabel 2.1

Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	0 – 50
Menengah Bawah	50 – 66
Menengah Atas	66 – 80
Tinggi	80 -100

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkatan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi yaitu antara 80-100 yang menandakan apabila sebuah daerah atau negara telah mencapai tingkat tersebut maka masyarakatnya telah sejahtera, sedangkan tingkatan Indeks Pembangunan Manusia yang paling rendah yaitu berkisar antara 0-50 yang berarti bahwa masyarakat suatu daerah atau negara belum sejahtera.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang dikuantifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup/AHH (e^0). Pengetahuan dikuantifikasikan dalam kemampuan baca tulis/angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Daya beli dikuantifikasikan terhadap kemampuan mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh Negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan

hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi.

2.4.1 Komponen-komponen IPM

A. Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir (life expectancy at birth) yang biasa dinotasikan dengan e^0 . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik maka e^0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live-birth) dan rata-rata anak yang masih hidup (still-living) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahun. Perhitungan e^0 dilakukan dengan metode *software Mortpak Life*. Angka e^0 yang diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

B. Pengetahuan

Seperti halnya UNDP, komponen IPM pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu melek huruf (*literacy rate*) penduduk 15 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak. Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

C. Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia menggunakan “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” (*adjusted real per capita expenditure*) atau daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity*).

2.4.2 Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan hidup yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana, tetapi hal ini

seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. *UNDP* mendefinisikan bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Konsep Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara. Dengan demikian, IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi. IPM yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Dalam konsep tersebut ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (*UNDP,1995*).

2.4.3 Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Adapun komponen IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang

telah disesuaikan (PPP rupiah), Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas.

Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

$$IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))$$

Dimana :

X(1) :Indeks harapan hidup

X(2) :Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-ratalamasekolah)

X(3) :Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandinganantara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilaimaksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.

Rumusnya dapatdisajikan sebagai berikut :

1. Indeks Harapan Hidup :

$$X(1) :[(eo - 25)/(85 - 25)] x 100$$

Dimana :

X(1) :Indeks harapan hidup

eo : angka harapan hidup.

25 : angka minimum harapan hidup (UNDP).

85 : angka maksimum harapan hidup (UNDP).

2. Indeks Pendidikan :

$$X(2) : \left[\frac{2}{3} \frac{[Lit - 0]}{(100 - 0)} + \frac{1}{3} \frac{[MYS - 0]}{(15 - 0)} \right] \times 100$$

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang bukan hanya tugas Pemerintah Daerah tetapi juga tugas masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijaksanaan Pemerintah Daerah akan membantu untuk mencapai sasaran pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dimana :

X(2) : Indeks pendidikan

Lit : Angka melek huruf.

MYS : Lama sekolah.

0 : Angka minimum baik untuk Lit maupun MYS.

100 : Angka maksimum Lit (melek huruf).

15 : Angka maksimum untuk MYS (lama sekolah).

3. Indeks Konsumsi Riil per Kapita :

$$X(3) : \left[\frac{PPP - 300,00}{732,7 - 300,00} \right] \times 100$$

Dimana :

X(3) : Indeks standar hidup layak

PPP : Nilai Konsumsi riil per kapita yang disesuaikan

300,00 : Nilai standar minimal (standar UNDP)

732,00 : Nilai maksimum (standar UNDP)

Untuk lebih mudah dalam memahami , berikut disajikan nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2.2
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global(UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global(UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global(UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

2.5 Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap IPM

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, maka pemerintah di berbagai negara berusaha untuk meningkatkan GNP maupun pendapatan per kapita dari penduduknya. Untuk tujuan tersebut maka pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi. Persyaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengaitkan antara keduanya (UNDP, 1966: 87).

Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan menejer akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumberdaya swasta dan masyarakat, modal sosial, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), dan organisasi kemasyarakatan.

Faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaannya sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumberdaya juga jelas karena tanpa distribusi sumberdaya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumberdaya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.